



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN ANTASARI

JURNAL KONSTITUSI

PUSAT KAJIAN KONSTITUSI FAKULTAS SYARIAH IAIN ANTASARI
KERJASAMA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Volume I No. 1, November 2012

- Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/ 2010
Hj. Wahidah
- Sistem Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia
Jamaludin Ghafur
- Weak Islamic Solidarity: A Survey on Indonesian Politics In 1940s, 1950s and During
Abdurrahman Wahid Presidency
Ahmad Muhajir
- Islam dan Paham Konstitualisme Modern
Muhammad Rizali
- Women's Participation in Establishing Local Regulations in the Era of Local Autonomy
(A Study in the Area of Malang City)
Adi Loka S. & Sirajuddin
- Studi Terhadap Perlindungan Anak Dari Buruh Migran/TKI Ke Luar Negeri di Daerah
Ibnu Subarkah
- Strategi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Peran Hukum
di Era Otonomi Daerah
Andina Elok Puri Maharani
- Menggagas Peradilan Progresif dalam Menegakkan Hak Konstitusional Warga Negara
Zakki Adhityati
- *Dissenting Opinion* dan *Concurring Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Dikaitkan dengan Akuntabilitas
Dwi Murniningsih

Pengantar Redaksi	v
<input type="checkbox"/> Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 Hj. Wahidah	1
<input type="checkbox"/> Sistem Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Jamaludin Ghafur	31
<input type="checkbox"/> Weak Islamic Solidarity: A Survey on Indonesian Politics In 1940s, 1950s and During Abdurrahman Wahid Presidency Ahmad Muhajir.....	51
<input type="checkbox"/> Islam dan Paham Konstitualisme Modern Muhammad Rizali.....	67
<input type="checkbox"/> Women's Participation in Establishing Local Regulations in the Era of Local Autonomy (A Study in the Area of Malang City) Adi Loka S. & Sirajuddin.....	97
<input type="checkbox"/> Studi Terhadap Perlindungan Anak Dari Buruh Migran/TKI Ke Luar Negeri di Daerah Ibnu Subarkah	117
<input type="checkbox"/> Strategi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Peran Hukum di Era Otonomi Daerah Andina Elok Puri Maharani	135

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

STRATEGI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF PERAN HUKUM DI ERA OTONOMI DAERAH

Andina Elok Puri Maharani¹

ABSTRACT

One of the purpose of nation is the welfare of its people. Such as Indonesia's objectives contained in the preamble of the 1945 Constitution. Welfare of the people is contrary with the poverty problems facing the nation during this time. Poverty is an economic issue to be resolved. The era of regional autonomy provides the opportunity for local government to play a role in solving the problems of poverty. The purpose of this study was to determine and analyze the concept of regional autonomy that had been valid and legal role in reducing poverty in the era of regional autonomy.

Keywords : Strategy, Poverty, Law, Regional autonomy

ABSTRAK

Tujuan suatu bangsa salah satunya adalah mensejahterakan rakyatnya. Seperti tujuan Negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan bertolak belakang dengan kemiskinan yang menjadi persoalan bangsa selama ini. Kemiskinan merupakan persoalan perekonomian yang harus diselesaikan. Era otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintahan daerah untuk berperan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Tujuan dari

¹ Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, email : andina_hukum@yahoo.com

kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep otonomi daerah yang selama ini berlaku dan peran hukum dalam pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah.

Kata Kunci : Strategi, Kemiskinan, Hukum, Otonomi daerah

PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan cultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.²

Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.³

Program-program kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara bagian, memperbaiki kondisi permukiman perkotaan dan perdesaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia lanjut. Selain program pemerintah, juga kalangan masyarakat ikut terlibat

2 <http://www.scribd.com/doc/14597304/TEORI-KEMISKINAN>

3 Hendriwan. 2003. "Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi". [Www.tripod.com](http://www.tripod.com).